

# Jurnal EKONOMIKAWAN

*by* Pratiwi Widiya Ningrum

---

**Submission date:** 02-Aug-2022 09:39PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1878101531

**File name:** Pratiwi\_Widiya\_Ningrum-192020100047.pdf (229.33K)

**Word count:** 5134

**Character count:** 33421

## Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanjangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Pratiwi Widiya Ningrum<sup>1\*</sup> dan Hendra Sukmana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit No. 666 B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215, Indonesia

\*e-mail : [pratiwi.widiya05@gmail.com](mailto:pratiwi.widiya05@gmail.com), [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

### ABSTRAK

#### Artikel Info

#### Received :

30 November 2020

#### Revised :

01 June 2021

#### Accepted :

30 July 2021

#### Kata Kunci :

Implementasi Publik,  
Kebijakan Publik,  
Program Keluarga  
Harapan, Kemiskinan

#### Keywords :

Public Implementation,  
Public Policy, Family  
Hope Program, Poverty

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Metode peneliti<sup>1</sup> ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berlandaskan dari data berkala yang berupa data atau petunjuk yang diperoleh dari masa ke masa dimana data tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan dari kegiatan atau keadaan yang sedang berlangsung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan menjadi fokus dalam penelitian ini. Menggunakan sumber data secara online dan offline, meliputi buku, karya ilmiah, dan beberapa berita yang terpercaya. Penelitian ini menunjukkan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjanganro dinilai dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pengimplementasikan PKH kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa dan pegawai atau pelaksana PKH dalam memberikan sosialisasi kepada warga mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), serta SDM yang ada di Desa Tanjanganro masih belum kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya yang dapat menyebabkan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan secara optimal juga adanya dukungan komitmen dari pemerintah desa dan pegawai dalam menjalankan program yang ada di Desa Tanjanganro. Disisi lain, adanya SOP untuk memberikan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan berdampak baik untuk pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto karena di Kabupaten Mojokerto berkurang.

## Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanjanganro Village, Ngoro District, Mojokerto Regency

### ABSTRACT

This study aims to explain the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanjanganro Village, Ngoro District, Mojokerto Regency. This research method is descriptive

*qualitative. The type of data used in this study is secondary data based on periodic data in the form of data or instructions obtained from time to time where the data provides an overview of the progress of activities or ongoing conditions Implementation of the Family Hope Program (PKH) in overcoming poverty be the focus of this research. Using online and offline data sources, including books, scientific papers, and some trusted news. This study shows the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tangangrono Village is assessed from 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In implementing PKH, the lack of coordination and communication between the village government and PKH employees or implementers in providing socialization to residents regarding the Family Hope Program (PKH), as well as human resources in Tangangrono Village are still not competent in carrying out their responsibilities in carrying out their duties which can lead to the Family Hope Program. (PKH) has not run optimally as well as the commitment support from the village government and employees in carrying out the existing programs in Tangangrono Village. On the other hand, the existence of SOPs to provide order in providing services to the community will also have a good impact on the local government of Mojokerto Regency because in Mojokerto Regency it is reduced.*

---

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan yang sering dihadapi dan diperhatikan oleh negara-negara yang ada di dunia bahkan masalah ini menjadi masalah global yaitu masalah kemiskinan (Todaro dan Smith; 2006). Menurut Arsyad (2010) ada dua aspek yang menggarisbawahi kemiskinan itu sendiri yaitu primer dan sekunder. Aspek utama berupa kemiskinan, kelompok politik sosial, keterampilan dan pengetahuan. Menurut Nugroho dkk (2012), kemiskinan diartikan sebagai keadaan relatif suatu daerah dimana tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar oleh seseorang atau sekelompok sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. (Solikhin, 2022)

Di negara berkembang sendiri, kemiskinan menjadi urusan yang sedikit kompleks, namun tidak sedikit negara berkembang telah mampu melakukan upaya pembaharuan dari segi pendapatan nasional dan produksi (Sartika et al. 2016). Tingkat kesejahteraan atau ketentraman warga yang menetap pada daerah atau tinggal di suatu daerah dengan kondisi kemiskinan yang tinggi maka ketentraman yang terciptanyanya akan rendah. Sebaliknya kedamaian akan tercipta apabila tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah dengan warga yang tinggal disana rendah maka akan terjadi kesejahteraan disana. Sebab tingkat atau indeks kesejahteraan dari warga yang tinggal merupakan gambaran dari kondisi suatu daerah (Christianto,2013). Di mana negara Indonesia merupakan negara dalam tahap mengembangkan pembangunannya dari segi sosial, ekonomi, dan politik, juga tingkat kemiskinan yaitu masalah yang masih menjadi ketertarikan oleh pemerintah (Noor Zuhdiyaty, 2017).

Pemerintah pusat selalu berusaha untuk meminimalisir masalah kemiskinan yang ada di Indonesia bahkan upaya pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas utama untuk memenuhi target pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Solusi mengatasi kemiskinan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015. Ini merupakan sebuah platform politik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga daerah dengan terstruktur dan teratur, yang memungkinkan kalangan bisnis dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memerangi kemiskinan yang semakin meningkat. Semakin tinggi kemiskinan dari tahun ke tahun menjadi pilihan dari banyaknya cara untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan ketentraman masyarakat Indonesia (Indonesia, 2010).

Solusi untuk mengatasi kemiskinan Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang mengatur kemiskinan Indonesia tidak bertambah. Ini termasuk (1) UU No. 13 Tahun 2011, (2) Keputusan Presiden Np. 15 Tahun 2010, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, (4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019, dan (7) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-Nas) jelas terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan hal tersebut, setiap negara bagian juga kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk berusaha mengatasi kemiskinan di daerah yang sama dengan keadaan sekarang. Oleh sebab itu, para pemerintah yang mengaplikasikan sistem dan perlindungan sosial yang tepat untuk semua warga dan memberikan perlindungan yang kasat mata untuk kelompok miskin dan rentan atau lanjut usia. Selain itu, pengurangan kemiskinan yang dilaksanakan untuk mencapai harapan bangsa yaitu, terbentuknya lingkungan warga yang sejahtera, adil, dan damai (Fadiang dkk, 2020)

Menjadi kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya naik adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dari 3 tahun terakhir. Permasalahan kemiskinan di kabupaten Mojokerto ini ditunjukkan melalui data tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto antara tahun 2019-2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan total penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto saat tahun 2019 mencapai 9,75% atau 108.810 jiwa penduduk; tahun 2020 naik menjadi 10,57% atau 118.800 jiwa; pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 0,05% menjadi 10.62% atau 120.540 jiwa. Di tahun 2020 Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan yang signifikan hingga 0.82% sebab di tahun 2020 ini pandemic covid-19 sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan beberapa mata pencaharian warga terkendala, banyak pegawai negeri di rumahkan, banyak buruh pabrik di PHK massal, dan beberapa pedagang yang menutup lapaknya akibat virus Covid-19. (Fidianing dkk, 2020)

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (000)	108.81	118.80	120.54
% Penduduk miskin	9.75	10.57	10.62
Garis kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	394003	406043	417784

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (2022)

Di berbagai daerah di Indonesia sering terjadi masalah kemiskinan dan Pemerintah Indonesia saat ini telah membuat beberapa program dalam menanggulangi yaitu: Program Raskin dan Subsidi BBM, Program Pengembangan Kecamatan (PKK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan masih banyak lagi beberapa program pemerintah yang dibuat untuk memberantas kemiskinan yang ada Di Indonesia contohnya adalah Program Keluarga Harapan, di mana PKH ini merupakan strategi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial yaitu bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan anggota keluarganya diharuskan untuk melakukan persyaratan juga ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Khodziah dkk, 2014). Misi utama PKH adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan melalui berbagai cara dengan menyediakan dana bersyarat kepada keluarga miskin untuk memungkinkan akses ke fasilitas yang diberikan sesuai UU. PKH ini mengentas biaya rumah tangga secara signifikan dan kemudian mendukung investasi generasi muda berikutnya melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Tetapi, beberapa fakta yang terlihat adalah masih banyaknya daerah terpencil di Indonesia masih belum bisa memanfaatkan PKH dengan baik dan benar sehingga PKH yang sudah berlangsung tidak teraplikasikan dan berharap bis dirasakan oleh beberapa warga setempat tidak terbedakan pada kawasan atau daerah di Indonesia tak terkecuali di Desa Tanjangan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto (Tety Tahlib, 2020)

Selama ini permasalahan kemiskinan di Desa Tanjangan disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia, sehingga kurang berdaya saing dalam mengejar kesempatan kerja. Oleh karena itu, hal ini menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Desa Tanjangan menanggapi kemiskinan melalui pelaksanaan PKH. Pendidikan dan keyakinan bahwa kemiskinan akan terjadi pengurangan. Dalam proses pengimplementasikan PKH di Desa Tanjangan terdapat beberapa kendala yaitu saat pendataan petugas PKH khusus bagian pendataan melakukan diskriminasi dimana mereka mendahulukan kerabat atau keluarganya terlebih dahulu dibandingkan orang yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH dan akhirnya orang-orang yang seharusnya mendapatkan atau terdata menjadi sasaran PKH tidak dapat terdata.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertama, Penelitian tersebut dilakukan oleh Artinya Eka Suwinta dan Indah Prabawati tahun 2016, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan teori implementasi kebijakan public. Hasilnya bahwa implementasi program PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sudah cukup baik dalam mengimplementasikan PKH kepada masyarakat hingga menjadi salah satu desa dengan penerima PKH terkecil. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori George C. Edward III. Untuk pembeda dalam penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu

penelitian terdahulu membahas mengenai PKH dan kesehatan sedangkan penelitian saat ini membahas implementasi pemerintah desa dan pegawainya (Antriya dan Indah, 2016)

Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Ula Jamilatul S tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Jombang (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang)”. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teori penelitian menggunakan teori implementasi program. Yang ditemukan didalam penelitian ini bahwa penyelenggaraan PKH di Kabupaten Jombang belum berjalan baik sebab terdapat hal yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Persamaan penelitian sebelumnya sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan teori David C. Korten dan penelitian saat ini menggunakan teori George C. Edward III. (Ula Jamilatul, 2018)

Ketiga, penelitian tersebut dilakukan oleh Alfian Fauzi Ardiyanto dan Indah Prabawati tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Didalamnya terdapat teori implementasi kebijakan. Hasil yang didapat adalah implementasi program PKH di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk belum terlaksana dengan optimal. Untuk persamaannya adalah sama menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Selain itu, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus hanya pada bidang pendidikan sedangkan penelitian saat ini tidak terfokus hanya pada bidang pendidikan. (Alfian dan Indah, 2021)

Dalam program mengatasi kemiskinan yang terjadi di Desa Tanggung ini, untuk implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Meskipun sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat desa, namun pemerintah Desa Tanggung masih belum mampu merangkul keseluruhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberian pelayanan PKH. Hal ini menyebabkan Sebagian penduduk kurang mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga menunjukkan reaksi warga yang tidak memperhatikan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Kurangnya sosialisasi terhadap warga yang kurang mampu program yang sedang dilakukan di desa jadi ada beberapa warga yang buta akan teknologi tidak mengerti dengan system yang ada di desa sehingga penyuluhan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) tidak berjalan secara optimal. Juga para petugas yang bersikap diskriminatif oleh petugas pendataan PKH yang lebih mendahulukan keluarga atau kerabat yang masuk dalam data sehingga keluarga miskin yang seharusnya masuk terdata PKH jadi tidak bisa terdata.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dengan adanya masalah-masalah yang ditemui, peneliti terdorong membuat penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanggung Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Dengan tujuan untuk menganalisis sampai mana proses implementasi PKH di Desa Tanggung. Sehingga, nantinya penelitian ini dapat bermanfaat mengatasi kemiskinan Desa Tanggung bahwa dengan adanya program ini dapat berdampak baik juga terhadap warga yang benar-benar membutuhkan.

## METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar data yang diperoleh dapat diolah dan dideskripsikan (Budiono, 2020). Peneliti memakai metode kualitatif agar bisa menggunakan dan menjelaskan lebih jelas penelitian dari hasil wawancara dan observasi mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Tanggung.

Kajian kualitatif ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui PKH di Desa Tanggung. Oleh George C. Edward III (1989,1) ia mengatakan bahwa masalah utama kebijakan public yaitu sedikitnya perhatian terhadap implementasi kebijakan public. Ditekankan bahwa tidak adanya implementasi efisiennya keputusan dari pembuat kebijakan atau program kecil kemungkinan akan berhasil. Oleh karena itu, George C. Edward III mengusulkan untuk memperhatikan empat isu utama (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi ketenagakerjaan, dan (4) Struktur birokrasi (Kartika Ayu dkk, 2020).

Pada penelitian kualitatif ini berfokus pada dimensi waktu dengan data sekunder yang berlandaskan dari data berkala yang berupa data atau petunjuk yang diperoleh dari masa ke masa dimana data tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan dari kegiatan atau keadaan yang sedang berlangsung. Metode ini dilihat dari data sekunder pada tahun 2018-2021. Oleh sebab itu, tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu mengatasi masalah, maka Tindakan yang ditempuh harus signifikan dengan masalah-masalah atau *problem* yang dijelaskan sebelumnya Sugiono (2012; 2). Menurut Silalahi (2012: 180) juga mengemukakan mengenai desain penelitian yaitu konsep dan tatakelola penyelidikan yang ditata dengan baik agar peneliti dapat mendapat data dari pertanyaan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III maka akan menggambarkan implementasi PKH yang ada di Desa Tanggung Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanggung Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Untuk sebagian program dari pemberantasan tingkat kemiskinan yang digagas oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial di bawah Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH sendiri dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberikan dukungan baik pengembangan solusi penurunan angka kemiskinan di Indonesia terkait PKH maupun maksud dan *goals* yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut adalah rencana yang sangat jelas dan detail. Desa Tanggung merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngoro Mojokerto, Jawa Timur yang sudah menerapkan PKH yang sudah dikemukakan Kementerian Sosial. Dalam memberikan pelayanan tentang PKH diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan warga desa, dapat diukur melalui model implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1989) yang memiliki empat indikator yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi sikap, dan (4) struktur birokrasi. Oleh karena itu, peneliti menjadikan empat indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan.

### Komunikasi

Komunikasi yaitu bagian terpenting di suatu kelompok, organisasi dan perusahaan agar saling memberikan sebuah informasi. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan perlu adanya sebuah komunikasi untuk memberikan sebuah informasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Proses komunikasi memiliki peran penting terhadap keberhasilan dari sebuah kebijakan. Proses komunikasi yang baik antara stakeholder mampu memberikan penyesuaian apa yang sedang direncanakan dan yang akan dikerjakan dalam pembuatan maupun proses pelaksanaan kebijakan dengan arahan pimpinan kepada staf maupun dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan proses implementasi kebijakan.

### **Sumber daya**

Pelaksanaan program membutuhkan sokongan dari sumber daya manusia dan anggaran atau sumber daya keuangan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sumber daya sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Oleh karena itu, sumber daya implementasi kebijakan awalnya memiliki staf yang dikatakan memiliki jumlah, keahlian, dan keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan. Jadi sumber daya yaitu yang pertama memiliki pegawai dikatakan cukup jumlahnya serta memiliki keahlian, keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. Dan yang kedua informasi yang dimaksud dalam sumber daya ini adalah sebuah informasi yang memadai untuk keperluan implementasi. Yang ketiga adalah kewenangan dalam implementasi kebijakan kewenangan sangat dibutuhkan untuk memiliki implementor dalam melaksanakan kebijakan. Dan yang terakhir fasilitas yang dimaksud dari fasilitas dalam implementasi kebijakan adalah pegawai atau pelaksana kebijakan yang mempunyai tugas utama untuk mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat.

### **Disposisi**

Disposisi adalah keinginan, motivasi, dan semangat pembuat kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang dengan lapang dada dan bersungguh-sungguh. Komitmen yang ditunjukkan bukan hanya dari pemerintah dan pendamping saja akan tetapi komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh pihak desa di mana mereka memiliki komitmen kuat untuk menjalankan kebijakan program keluarga harapan, sikap, dan komitmen pelaksana terhadap program jika bersinergi maka akan dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan PKH. Sikap dan insentif merupakan faktor yang bisa memberi dampak bagi efektifnya suatu implementasi kebijakan. Para pegawai atau pelaksana yang berkaitan langsung dengan kegiatan PKH, baik coordinator maupun pendamping harus siap terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang menerima bantuan PKH.

### **Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan bagian terpenting yang memiliki dampak yang sangat besar dan sangat drastis dalam implementasi kebijakan. Bahwa terdapat dua indikator utama dari birokrasi yaitu prosedur dan struktur birokrasi yang pertama dari aspek prosedur dalam mengimplementasikan suatu kebijakan seringkali yang sudah dikerjakan dan disepakati sebelumnya sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini menjadikan sebuah instruktur untuk implementor saat bekerja agar dalam

melaksanakan kebijakan atau aturan tidak meleset jauh dan sesuai dari visi misi dari *goals* dari kebijakan.

## Pembahasan

### Komunikasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam hal ini, Pemerintah dan pendamping PKH Desa Tanjanganrono telah melakukan komunikasi dengan cara memberikan sosialisasi terkait PKH, kegiatan sosialisasi ini diberikan pemerintah dan pendamping dengan maksud untuk memberi arahan tentang PKH dan proses mekanisme penyaluran dana bantuan serta sebagai pendekatan antara pendamping dan penerima PKH. Kejelasan informasi juga sangat dibutuhkan agar informasi yang didapat tidak simpang siur yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat. Kejelasan diperlukan dalam prosedur pendataan, penyaluran dan pendampingan PKH apabila terdapat ketidaksesuaian dan membingungkan maka akan berpengaruh jalannya PKH. Oleh karena itu, kejelasan ini harus terus dilakukan oleh pemerintah yaitu konsisten dalam menyalurkan dana bantuannya.

Dalam pelaksanaan PKH masih belum dinyatakan optimal sebab terdapat masyarakat yang tidak paham mengenai PKH. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pendamping dalam menginformasikan PKH kurang optimal sehingga terdapat masyarakat yang tidak mengerti mengenai mekanisme dari pendataan, penerimaan dan tujuan dari PKH.

### Sumber daya dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Data di bawah menunjukkan mekanisme koordinasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tanjanganrono untuk menjalankan program yang telah dibentuk oleh Pemerintah. Seperti yang dicantumkan didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 10 ayat (1) sehubungan dengan sumber daya manusia terdiri atas a. Penasihat nasional; b. Tenaga bantuan Teknik; c. Tenaga ahli; d. Koordinator regional; e. Koordinator wilayah; f. Koordinator daerah kabupaten/kota; g. Supervisi pekerjaan sosial; h. Pendamping sosial; i. Asisten pendamping sosial; dan j. Administrator pangkalan data.

**Tabel 2.** Pengurus PKH Desa Tanjanganrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

No	Kedudukan	Nama
1	Pendamping Kecamatan	Priyono
2	Kepala Dusun	Prado Antino
3	Ketua Anggota PKH	Suwani
4	Wakil Ketua PKH	Adi Susilo
5	Sekretaris	Satih
6	Bendahara I	Nyuwati
7	Bendahara II	Maria Ulfa
8	Pengurus PKH Sekolah	Sumarni, Sunarsih, Girun, Suliswati, Nyampeni,
9	Pengurus PKH Lansia	Jumiati, Laseni, Darmi, Pairah, Sungkeli, Kabuli
10	Anggota PKH	All

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Jadi, data penerima PKH didapat terlebih dahulu dari masing-masing ketua RT akan mendataarganya yang memenuhi syarat untuk terdata dalam penerima PKH kemudian data tersebut akan diserahkan ke kepala dusun dilanjutkan ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, dan pihak dari kabupaten menyerahkan data ke provinsi dan akan diterima di Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, apabila ada kabar atau berita dari pusat mengenai PKH akan didampingi oleh pihak dari Kecamatan yang akan menyampaikan ke Kepala Dusun yang akhirnya nanti akan disampaikan ke ketua PKH berita atau kabar apa yang didapat dari pusat akan disampaikan ke para anggota.

Dalam proses pendampingan PKH di Desa Tanggung Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto terdapat pegawai pegawai atau pelaksana untuk ditugaskan sebagai pendamping PKH di desa. Terdapat 6-8 pegawai atau pelaksana untuk mendampingi penduduk yang menerima PKH di Desa Tanggung. Tugas dari pendamping adalah untuk memberikan informasi terkait PKH dan memiliki wewenang untuk mendampingi. Sedangkan penduduk yang menerima bantuan PKH kurang lebih dari 100 orang yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai PKH masih belum bisa berjalan sesuai SOP juga kurang kompetennya SDM dan tidak berkualitas di bidangnya yang menjadi pengurus atau pegawai PKH hingga terjadinya diskriminasi yang mendahulukan pihak kerabat atau keluarga untuk mendapatkan pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tidak hanya itu fasilitas dan anggaran juga sangat penting dalam mensukseskan tujuan dari program PKH. Saat PKH ini diterapkan pemerintah mengharapkan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menurunkan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu pengeluaran barang-barang rumah tangga akibat dari pembelian langsung yang terlalu besar juga menjadikan PKH ini untuk salah satu cara untuk investasi di masa depan memperbaiki kehidupan di masa sekarang dengan cara meningkatkan akses dalam bidang kesehatan dan pendidikan sebab pengembangan modal manusia.

**Tabel 3. Rincian Bantuan PKH**

<b>Bantuan</b>	<b>Nominal Bantuan</b>
Bantuan/RTSM/Tahun	Rp 200.000,-

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah sangat menginginkan PKH mampu meminimalisir kemiskinan secara turun temurun khususnya di Desa Tanggung. Strategi pengentasan kemiskinan pemerintah melalui PKH menghasilkan Langkah-langkah meminimalisir angka kemiskinan yang sudah berlangsung lama. Luaran atau *outcome* yang diharapkan dari program ini adalah PKH mengikuti konsep pelaksanaan. Sebuah proses dilakukan di Desa Tanggung untuk menjamin berjalannya regulasi dan mensukseskan regulasi dari konsep pelaksanaan yang dilakukan.

**Tabel 4.** Bantuan PKH di Desa Tangangrono

No	Penerima PKH	Jumlah Anggaran (Ribu)
1	Balita	250
2	SD	75
3	SMP	125
4	SMA	150
5	Lansia	200

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan memberikan bantuan kepada RTSM/KSM. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Penyaluran dana PKH akan dikirim langsung dari Pemerintah Pusat kepada rekening masing-masing penerima PKH yang akan diterima per triwulan atau dalam 3 bulan sekali yang di mana penyaluran bantuan ini sudah sesuai dengan peraturan atau pedoman umum dari PKH, di mana pemberian dana PKH dilakukan empat kali dalam 1 tahun. Untuk bantuan PKH yang diberikan kepada RTSM/KSM harus sudah menjadi anggota PKH yang mana nantinya penyaluran dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) akan masuk ke dalam rekening masing-masing anggota PKH. Oleh karena itu, para anggota yang menerima bantuan PKH harus membuat rekening yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat dikirimnya anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

**Tabel 5.** Data Kartu Keluarga dan Anggaran PKH Desa Tangangrono

No	Tahun	Data Penerima PKH dalam Kartu Keluarga (KK)	Anggaran Dana PKH Desa Tangangrono
1	2018	93	113.100.000
2	2019	89	50.275.000
3	2020	80	57.825.000
4	2021	88	59.225.000
5	2022	77	49.550.000

Sumber : Hasil Olah Penulis (2022)

Dari acuan data yang sudah dibuat pada tahun 2020 penerima PKH di Desa Tangangrono turun dari 89 KK ke 80 KK yang mana Pemerintah desa berhasil dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Desa namun pada tahun 2021 meningkat kembali 8 KK menjadi 88 KK sebab antara tahun 2020-2021 banyak pegawai atau buruh pabrik yang di PHK massal yang menyebabkan tingkat penerima PKH meningkat tetapi di tahun 2022 turun 12% ke angka 77 yang artinya Program Pemerintah Harapan di Desa Tangangrono berhasil akan tetapi SDM yang bertugas dalam menjalankan tugasnya kurang memahami proses PKH.

#### **Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Wujud komitmen yang harus dilakukan pendampingan PKH Desa Tangangrono saat mengatasi masalah kemiskinan. Disposisi juga merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk implementasi kebijakan disposisi, yang juga sangat penting dalam pendekatan penelitian implementasi kebijakan public. Saat menerapkan kebijakan public,

perlu mengerti yang dilakukan dan tidak hanya mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya serta harus memiliki kemauan menerapkannya. Dari berbagai indikator yang memberikan dampak pada pengimplementasian kebijakan, faktor disposisi merupakan alasan terpenting implementasi kebijakan karena berkaitan dengan sikap implementasi atau sikap pemangku kepentingan.

Selalu memberikan pendampingan jika terjadi permasalahan saat proses pencairan dana pendapatan insentif ini diberikan untuk menunjang kegiatan pendampingan selama Pandemi Covid-19, dikarenakan saat ini tidak bisa melakukan perkumpulan oleh sebab itu diganti dengan pendampingan secara online yang diharapkan dengan adanya pendampingan ini dapat membantu dalam pendapatan insentif dan dalam memaksimal pendampingan secara online.

### **Struktur birokrasi pemerintahan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Seperti pada Implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di desa Tanggungrono memiliki SOP atau standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaannya yang tentunya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau Kementerian Sosial untuk menentukan kriteria penduduk yang berhak menerima PKH, karena PKH merupakan program bantuan bersyarat yang bisa dikatakan program ini hanya dipergunakan untuk keluarga yang sangat miskin. Dalam pelaksanaan PKH sangat penting untuk membagi tugas serta tanggungjawab antara subunit kerja. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dari pemerintah pusat sampai yang terendah yaitu penerima PKH. Akan tetapi terdapat permasalahan pada tugas dan fungsi yang tidak dipahami sampai pada level terendah. Oleh sebab itu, struktur birokrasi yang mencakup dari beberapa hal yaitu standar pelaksanaan dan standar operasional prosedur yang mana hal ini dapat mempermudah untuk menyamakan Tindakan dari para pelaku kebijakan saat melakukan pekerjaan yang telah dikuasai sesuai keahlian pekerjaannya. Mekanisme dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi:



Dapat ditarik pemahaman bahwa teori Menurut Edward III jika dikaitkan dengan fenomena yang ada di lapangan sudah sesuai dalam SOP yang ditetapkan dan di mana dalam penyebaran wewenang dari struktur birokrasi telah dilakukan secara baik oleh masing-masing pelaksana dan pegawai kebijakan dengan Batasan wewenang yang sudah ditentukan secara umum. Program keluarga harapan adalah program yang dibuat kementerian sosial dengan harapan untuk meminimalisir kemiskinan. dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Tangangrono

## SIMPULAN

Penelitian menggambarkan bahwa implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung program atau kegiatan pemerintah dalam salah satunya Pemerintah Desa Tangangrono yang mengimplementasikan PKH meskipun belum berjalan secara optimal dan apabila membandingkan dengan 4 indikator teori Implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu Pertama, komunikasi dalam mengimplementasikan PKH ini dinilai belum bisa dinilai tercapai karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana atau pegawai dalam memberikan penjelasan mengenai mekanisme dari PKH yang menyebabkan PKH belum bisa berjalan dengan maksimal. Kedua, Sumber daya yang ada di Desa Tangangrono dalam melakukan PKH belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya SDM dalam mengimplementasikan PKH sebab banyak pegawai dari PKH yang masih belum mengetahui digitalisasi yang mana sekarang sudah memasuki era 4.0 yang mengharuskan semua sistem serba digital menyebabkan banyak pegawai yang keteteran karena belum memahami sistem. Juga

terjadinya diskriminasi saat berlangsungnya sosialisasi mengenai PKH, para petugas PKH mendahulukan keluarga dari pada yang datang terlebih dahulu untuk mengikuti sosialisasi. Ketiga, Disposisi implementor yang dinilai sudah terlaksana dengan baik karena para pegawai atau pelaksana melakukan pencarian sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Keempat, Struktur birokrasi pada implementasi PKH dinyatakan tercapai karena komitmen yang diberikan pemerintah desa dan pegawai dalam menangani tentang PKH yang memberikan pengaruh baik kepada warga untuk percaya kembali sistem pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Rekomendasi untuk penelitian ini yaitu agar pemerintah desa dengan para pegawai atau pelaksana program yang bertanggung jawab dalam masalah PKH dapat melaksanakan program dengan optimal yaitu Pertama, melakukan sosialisasi dengan benar tanpa adanya diskriminasi di dalamnya entah itu keluarga atau kerabat yang terdapat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan apabila keluarga atau kerabat tidak terdapat dalam PKH diharapkan pegawai tidak semena mena dalam memberikan pelayanan. Kedua, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemerintah desa dan pegawai dalam memberikan sosialisasi atau dana PKH. Jadi program atau kegiatan nantinya yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa yang melibatkan warga akan berjalan dengan optimal tidak akan ada kesalahan yang terjadi di dalamnya. Ketiga, menambah sumber daya manusia yang memahami mengenai apa itu PKH dapat beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mencari dan menyeleksi terlebih dahulu atau menyaring pegawai yang sesuai dengan bidangnya dipercaya dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya yang diselenggarakan agar saat pegawai atau pelaksana saat ditanyai mengenai prosedur tidak bingung dalam memberikan penjelasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2012). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Ardiyanto, A. F., & Prabawati, I. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WAUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK (STUDI PADA BIDANG PENDIDIKAN). *Publika*, 13-24.
- Kushardiyanti, K. A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Ekuilibrium*, 4(1), 1-16.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Solikhin. (2022). KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2021, APA SAJA PENYEBABNYA? . *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 5(1), 71-82.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Sutarliyah, U. J. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Jombang (Studi pada Unit*

*Pelaksana Program Keluarga Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Suwinta, A. E. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Publika*, 3(8).

Thalib, T. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 7(1), 39-48.

# Jurnal EKONOMIKAWAN

---

## ORIGINALITY REPORT

---

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

5%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On